

INDOTEXTILES

The Indonesian Textiles, Apparel & Fashion Community Reference



WORLD TEXTILES JOURNAL

DAIKIN CHEMICAL SOUTHWEST ASIA CO., LTD.

No. 6302, Binang Cross at Road 207 Fuku Uchi 2691, 1411, Sakurami (Korea)
Bangkok, SUD-040115, Bangkok Office, BANGKOK 2090, Thailand
Tel: +66-2-209-2022

Search here for more information

UNIDYNE



Biaya Logistik Perlu Perhatian Pemerintah

Di tengah kondisi pasar yang belum pulih baik domestik maupun ekspor, kinerja industri TPT nasional kali ini terhambat oleh mahalnya biaya angkut yang meningkat hampir 4 kali lipat ditambah sulitnya mendapatkan peti kemas terutama untuk pasar tradisional yang berada di wilayah tersebut. negara tujuan ekspor utama.

Di sini sekali lagi diperlukan intervensi pemerintah agar kinerja ekspor TPT tetap terjaga diiringi penguasaan pasar dalam negeri. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pemulihan industri TPT nasional.

Bulan ini kami meluncurkan INDOTEXTILES TV yang dapat diakses melalui Channel kami di Youtube, Instagram dan Tiktok. Semoga dapat memudahkan pembaca dalam mengakses informasi yang kami sajikan dengan lebih mudah dan cepat. Terima kasih atas dukungan Anda sejauh ini.

Salam,
Tim Redaksi

ISI EDISI ke-82

Berita Utama

- Koperasi Batik sebagai Solusi Menghadapi Serbuan Impor Tekstil
-

Berita Terbaru

- Nasib Pan Brothers dan Masa Depan Industri Tekstil Nasional di Ambang Keputusan
- Produk Tekstil dan Kelapa Sawit RI Bebas Bea Masuk ke Kanada Mulai 2026
- Italia Perkenalkan Teknologi Mesin Tekstil Canggih ke Indonesia untuk Dukung Daya Saing Global
- Penghapusan PPN Impor Kapas: Peluang Efisiensi bagi Industri Tekstil Indonesia
- Insentif Industri Padat Karya Dinilai Tak Berdampak Signifikan pada Sektor Tekstil
- Pelemahan Rupiah Memukul Industri Tekstil, Barang Impor China Kian Mendominasi
- Impor Ilegal Dituding Sebagai Pemicu PHK Massal di Industri Tekstil, Wamenaker Serukan Kerja Sama Semua Pihak
- Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Industri Tekstil di Tegal
- Lonjakan PHK Sepanjang 2024: Industri Tekstil dalam Kondisi Kritis
- Industri Tekstil Ambruk, Apindo Dukung Revisi Permendag 8/2024
- Proyeksi Kinerja Emiten Tekstil di 2025: Tantangan yang Masih Berat
- Industri Tekstil Nasional: Harapan Baru di Momentum Lebaran
- Prabowo Ancam Tenggelamkan Kapal Penyelundup Tekstil, Buruh Desak Tindakan Tegas Terhadap Pemain Besar

BERITA UTAMA

Koperasi Batik sebagai Solusi Menghadapi Serbuan Impor Tekstil



Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop), Ferry Juliantono, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung industri tekstil nasional, khususnya perlindungan terhadap para perajin batik. Salah satu upaya konkret adalah mendukung Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK), koperasi batik terkemuka di Surakarta, Jawa Tengah.

Dalam audiensi dengan pengurus Koperasi SDK di Kampung Kauman, Solo, Ferry mengapresiasi semangat perjuangan koperasi tersebut. Ia menyatakan, "Kemenkop sangat fokus pada perlindungan industri garmen, terutama batik, yang menjadi bagian penting budaya dan ekonomi Indonesia."

Dorongan terhadap Regulasi Perlindungan Industri Tekstil

Ferry mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama adalah belum adanya undang-undang yang melindungi industri tekstil dari produk impor seperti kain bekas dan batik printing. Kemenkop telah mengajukan naskah akademik RUU Perlindungan Industri Tekstil kepada Kementerian Perindustrian dan DPR. Ia berharap RUU ini dapat segera disahkan

sebagai payung hukum yang melindungi para pelaku industri dalam negeri.

Selain itu, Ferry juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan impor yang merugikan industri lokal, termasuk kebijakan bea impor nol persen pada beberapa komoditas. Dalam berbagai koordinasi dengan instansi terkait, ia mendorong pembentukan Satgas Impor untuk mengatasi dampak negatif kebijakan impor tersebut.

Showroom Bersama untuk Perajin Batik

Sebagai bentuk dukungan nyata, Wamenkop Ferry meresmikan Showroom Bersama di Kampung Kauman, Solo. Showroom ini menjadi solusi bagi perajin yang tidak memiliki fasilitas pemasaran sendiri. Selain memperluas akses pasar, showroom ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan volume produksi batik lokal serta menarik wisatawan.

"Melalui inisiatif ini, perajin batik lokal diharapkan mampu bersaing dengan produk impor seperti batik printing dan pakaian bekas," jelas Ferry.

Rebranding dan Digitalisasi Koperasi

Kemenkop juga mendorong koperasi untuk bertransformasi melalui rebranding dan digitalisasi. Salah satu langkah konkret adalah dengan menjadikan koperasi sebagai mitra vendor dalam berbagai kegiatan kementerian. Ferry menyebut, "Kami akan memesan seragam batik dari Koperasi SDK sebagai bentuk dukungan ekosistem gotong royong."

Dukungan lainnya mencakup penguatan kelembagaan koperasi melalui pembiayaan dari LPDB, pemerintah daerah, dan dinas terkait. Ferry berharap, keberhasilan Koperasi SDK dapat menjadi inspirasi bagi koperasi lain untuk berkembang dengan model serupa.

Perkembangan dan Inisiatif Koperasi SDK Berdiri sejak 2012, Koperasi SDK telah berkembang menjadi lembaga dengan tiga bidang utama: pelatihan membatik, unit jasa keuangan syariah, dan SDK Mart. Pelatihan membatik yang mereka selenggarakan telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, sementara SDK Mart membantu pedagang kecil di Kauman pasca pandemi Covid-19.

Salah satu inovasi penting Koperasi SDK adalah pendirian showroom bersama yang tidak hanya memasarkan produk batik, tetapi juga menjadi destinasi wisata. Ketua Pengurus Koperasi SDK, Muchammad Yuli, berharap showroom ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan potensi pasar, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan mendukung kesejahteraan perajin batik.

Dengan dukungan pemerintah dan inovasi yang berkelanjutan, Koperasi SDK menjadi model bagaimana koperasi dapat menjadi solusi menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus memperkuat posisi industri batik sebagai warisan budaya bangsa.



BERITA TERBARU

Nasib Pan Brothers dan Masa Depan Industri Tekstil Nasional di Ambang Keputusan

Nasib PT Pan Brothers Tbk. (PBRX), salah satu raksasa di sektor garmen dan tekstil nasional, akan diputuskan besok terkait Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebesar US\$ 393,3 juta atau setara Rp 6,25 triliun. Keputusan ini mengikuti perpanjangan putusan oleh majelis hakim selama 14 hari pada 22 November 2024.



Pan Brothers bukanlah satu-satunya perusahaan tekstil yang mengalami krisis. Sebelumnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Situasi ini menandakan ancaman serius terhadap industri tekstil nasional yang mempekerjakan ratusan ribu pekerja.

DPR Serukan Langkah Penyelamatan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis menyelamatkan industri tekstil nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi potensi kepailitan perusahaan lain dalam sektor ini.

“Saya berharap pemerintah dapat melakukan langkah penyelamatan untuk industri-industri sandang dalam negeri,” ujar Chusnunia, Kamis, 5 Desember 2024. Menurutnya, perhatian pemerintah harus mencakup perlindungan terhadap kelangsungan usaha dan pekerja yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.

Pengetatan Impor dan Optimalisasi Industri Tekstil

Chusnunia juga meminta pemerintah memperketat kebijakan impor sandang yang merugikan industri lokal. Kebijakan ini dinilai

penting untuk menjaga daya saing produk tekstil dalam negeri. Ia menekankan perlunya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan demi mengoptimalisasi industri tekstil nasional.

“Ini bukan hanya nasib satu atau dua industri, melainkan langkah bersama untuk menjaga dan mengoptimalkan industri sandang nasional,” tambahnya.

Kondisi Utang Pan Brothers

Dalam situasi ini, Pan Brothers mencatatkan utang sebesar US\$ 393,3 juta dalam perkara 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dan US\$ 131,9 juta dalam perkara 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Total utang terhadap kreditur finansial, termasuk bank dan pemegang obligasi, mencapai US\$ 340 juta. Salah satu skema restrukturisasi yang diajukan adalah melalui Obligasi Wajib Konversi (OWK).

Tantangan dan Harapan

Krisis yang dialami Pan Brothers dan Sritex menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk segera bertindak. Dukungan strategis, kebijakan perlindungan, dan pengelolaan yang lebih efektif dibutuhkan agar industri tekstil dapat bangkit. Jika tidak, risiko domino kepailitan dapat mengancam sektor ini dan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

Keputusan yang diambil besok akan menjadi tonggak penting, tidak hanya bagi Pan Brothers, tetapi juga untuk masa depan industri tekstil nasional.

Produk Tekstil dan Kelapa Sawit RI Bebas Bea Masuk ke Kanada Mulai 2026

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA) telah mencapai penyelesaian substansi dan akan mulai berlaku pada tahun 2026. Kesepakatan ini

membawa berbagai keuntungan bagi Indonesia, terutama dalam memperluas akses pasar dan menghilangkan hambatan perdagangan.

Manfaat ICA-CEPA bagi Indonesia

Menteri Perdagangan Indonesia, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa perjanjian ini memberikan liberalisasi perdagangan barang Indonesia hingga 90,5% dari total pos tarif yang berlaku di Kanada. Hal ini mencakup nilai perdagangan sebesar USD 1,4 miliar.



Beberapa produk prioritas yang akan menikmati bebas tarif bea masuk di Kanada adalah:

Tekstil

Kertas dan turunannya

Kayu dan turunannya

Makanan olahan

Sarang burung walet

Kelapa sawit

Selain manfaat di sektor barang, perjanjian ini juga memberikan keistimewaan dalam perdagangan jasa, dengan preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia, mencakup sektor bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi.

Peluang Investasi dan Pembukaan Pasar

ICA-CEPA membuka peluang besar bagi investasi dan akses pasar di berbagai sektor strategis, seperti:

Manufaktur

Pertanian

Perikanan

Kehutanan

Pertambangan

Infrastruktur energi

Perjanjian ini juga mencakup aspek hak kekayaan intelektual, e-commerce, persaingan usaha, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan lingkungan, yang menunjukkan komitmen kedua negara terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dampak terhadap Akses Pasar Amerika Utara Menurut Budi, ICA-CEPA memberikan peluang besar bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar Amerika Utara. Dengan perjanjian ini, Indonesia dapat mengatasi berbagai hambatan perdagangan dari negara-negara di sekitar Kanada, memperluas jangkauan produk ke pasar yang lebih luas.

"Kesepakatan ini membuka akses besar untuk kita masuk ke negara lain di Amerika Utara melalui Kanada," ujar Budi.

Kerjasama Strategis antara Indonesia dan Kanada

Penandatanganan Joint Ministerial Statement antara Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pengembangan Ekonomi Kanada Mary Ng dan Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso menandai berakhirnya negosiasi ICA-CEPA. Selain itu, dua Nota Kesepahaman (MoU) turut ditandatangani, yaitu Kerjasama Mineral Kritis dan Kerjasama Sanitasi dan Vito Sanitasi.

Rencananya, perjanjian ini akan ditandatangani secara resmi pada pertengahan 2025, dengan implementasi mulai tahun 2026.

ICA-CEPA menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar

global, khususnya di Kanada dan Amerika Utara. Dengan pembebasan tarif untuk berbagai produk unggulan dan peluang investasi di sektor strategis, perjanjian ini diharapkan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Kanada sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Italia Perkenalkan Teknologi Mesin Tekstil Canggih ke Indonesia untuk Dukung Daya Saing Global



Italia, yang dikenal sebagai pusat mode dunia, membawa teknologi mesin tekstil mutakhir ke Indonesia melalui Workshop Italian Textile Technology Indonesia. Acara yang diselenggarakan oleh Italian Trade Agency dan ACIMIT ini berlangsung di Solo dan Bandung, bertujuan untuk memperkenalkan teknologi terbaru yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mendukung keberlanjutan industri tekstil lokal.

Teknologi Inovatif untuk Industri Tekstil Indonesia

Workshop ini menghadirkan berbagai teknologi terkini dari perusahaan tekstil Italia, seperti finishing, dyeing, non-woven, spinning, weaving, knitting, dan laboratorium tekstil. Teknologi ini dirancang untuk mendukung transformasi digital, penerapan Internet of Things (IoT), serta solusi ramah lingkungan, sesuai dengan tuntutan Industri 4.0.

Dr. Paolo Pinto, Trade Commissioner dari Italian Trade Agency, menekankan bahwa teknologi tekstil Italia mampu menawarkan efisiensi produksi dan kualitas tinggi sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

“Melalui workshop ini, kami memberikan peluang kepada pelaku industri tekstil Indonesia untuk mengenal teknologi otomatisasi dan digitalisasi yang dapat memperkuat daya saing di pasar internasional,” ujarnya.

Kolaborasi untuk Masa Depan yang Berkelanjutan

Presiden ACIMIT, Dr. Marco Salvade, menjelaskan bahwa Italia tidak hanya membawa teknologi, tetapi juga membuka ruang untuk kolaborasi strategis. Jawa Tengah, sebagai pusat produksi tekstil dan batik, menjadi lokasi yang ideal untuk penerapan teknologi ini.

“Kami ingin menciptakan masa depan industri tekstil yang lebih berkelanjutan. Workshop ini adalah langkah awal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman demi meningkatkan kualitas dan daya saing global industri tekstil Indonesia,” kata Dr. Salvade.

Lilie Setiawan, perwakilan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, juga menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menawarkan transfer teknologi melalui pertemuan B2B, tetapi juga membuka peluang kemitraan strategis untuk menghadapi tantangan industri di masa depan.

“Dengan teknologi ini, perusahaan tekstil Indonesia dapat mempercepat proses produksi sekaligus memenuhi standar keberlanjutan yang kini menjadi prioritas di pasar global,” jelasnya.

Momentum untuk Modernisasi Industri Tekstil

Acara ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi modernisasi industri tekstil Indonesia. Teknologi dari Italia tidak hanya memberikan solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi tetapi juga mendukung transisi menuju industri yang lebih hijau.

Dengan adanya inisiatif ini, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar tekstil global, menciptakan standar baru yang mengutamakan inovasi, kualitas, dan keberlanjutan.



Penghapusan PPN Impor Kapas: Peluang Efisiensi bagi Industri Tekstil Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendukung pertumbuhan industri tekstil dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada impor kapas, bahan baku utama yang sangat dibutuhkan oleh industri tekstil.

Efisiensi Produksi dengan Penghapusan PPN Kebijakan ini disambut positif oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, meskipun dampaknya tidak dirasakan langsung oleh seluruh anggota APSyFI. Redma menjelaskan bahwa kebijakan ini akan mengurangi biaya di sektor pemintalan, yang pada gilirannya

akan memberikan dampak positif pada rantai produksi tekstil secara keseluruhan.

"Dengan turunnya biaya di sektor pemintalan, efisiensi biaya produksi dapat tercapai. Hal ini membuka peluang bagi peningkatan daya saing produk tekstil Indonesia, baik di pasar domestik maupun global," jelas Redma.

Redma juga menambahkan bahwa kapas sebagai bahan baku alami sebenarnya tidak layak dikenakan PPN karena belum mengalami proses pengolahan atau memiliki nilai tambah yang signifikan. Oleh karena itu, penghapusan PPN impor kapas dianggap langkah strategis yang mendukung keberlanjutan industri tekstil.

Mengatasi Tantangan Pasokan Bahan Baku
Salah satu kendala utama yang dihadapi industri tekstil Indonesia adalah keterbatasan pasokan bahan baku kapas. Hal ini mendorong pemerintah untuk memperkuat sektor hulu dan mencari solusi jangka panjang. Tim Koordinasi Perencanaan Industri Nasional Kemenperin mencatat pentingnya menjaga kestabilan pasokan bahan baku untuk kelangsungan produksi.

Gosen, Ketua Tim Koordinasi Perencanaan Industri Nasional Kemenperin, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor hulu industri tekstil. Dalam acara Jakarta Economic Forum: Outlook 2025, ia menyebutkan beberapa kebijakan yang telah dirancang, seperti:

Penghapusan PPN impor kapas, untuk mengurangi beban biaya industri.

Kemudahan perizinan, guna mempercepat proses investasi di sektor tekstil.

Pengembangan energi terbarukan, yang mendukung keberlanjutan produksi.

Meningkatkan Daya Saing dan Peluang Ekspor

Dengan kebijakan ini, industri tekstil Indonesia diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Efisiensi biaya akan meningkatkan kapasitas produksi dan membuka peluang ekspor yang lebih besar, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku.

Namun, untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada:

Substitusi bahan baku kapas, guna mengurangi ketergantungan pada impor.

Pengembangan sektor hulu, dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Jaminan pasokan bahan baku, untuk menjaga kelangsungan produksi di tingkat domestik.

Harapan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan Ke depan, dengan dukungan kebijakan strategis seperti penghapusan PPN impor kapas, industri tekstil Indonesia diharapkan mampu memainkan peran yang lebih signifikan di pasar global. Selain itu, pertumbuhan sektor ini juga akan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah dan pelaku industri kini perlu bekerja sama untuk memanfaatkan peluang ini secara maksimal, menjadikan kebijakan sebagai pendorong bagi kebangkitan industri tekstil Indonesia.



Insentif Industri Padat Karya Dinilai Tak Berdampak Signifikan pada Sektor Tekstil



Kebijakan pemerintah untuk mendukung industri padat karya melalui insentif fiskal dinilai kurang efektif oleh Asosiasi Produsen Benang, Serat, dan Filamen Indonesia (APSyFI). Meski insentif tersebut dirancang untuk meringankan beban pelaku usaha di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menyatakan bahwa langkah ini tidak akan memberikan dampak signifikan bagi industri yang sudah terseok-seok selama lebih dari dua tahun.

Pemerintah memberikan beberapa insentif, termasuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan, subsidi bunga 5% untuk revitalisasi mesin, serta bantuan Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 50%

selama enam bulan untuk sektor padat karya. Namun, menurut Redma, insentif ini tidak menysasar akar permasalahan industri TPT, yakni banjirnya produk impor ilegal yang menguasai pasar domestik.

Impor Ilegal, Tantangan Utama Sektor TPT

Redma menyoroti bahwa kondisi pasar yang lesu disebabkan oleh maraknya barang impor ilegal yang tidak hanya membanjiri pasar domestik tetapi juga menikmati keistimewaan berupa bebas pajak. Sepanjang 2023, APSyFI mencatat sebanyak 37.000 kontainer produk TPT impor ilegal masuk ke Indonesia, menciptakan tekanan besar pada produsen lokal.

“Insentif apapun akan sulit dimanfaatkan secara optimal selama kita harus bersaing dengan barang impor ilegal. Kecuali pemerintah memberikan perlakuan pajak yang setara atau bahkan bebas pajak untuk produsen lokal seperti yang dinikmati barang impor ilegal,” ungkap Redma.

Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Industri Tekstil

Salah satu insentif yang dianggap lebih relevan oleh APSyFI adalah potongan diskon PPN menjadi 5% atau pemberlakuan PPN final 15% yang hanya berlaku untuk produk akhir. Skema ini diyakini lebih efektif karena dapat mengurangi beban pajak pada industri tekstil yang memiliki rantai nilai panjang, di mana biaya pajak sering kali menggerus margin keuntungan.

“Jika pemerintah benar-benar ingin memberikan insentif fiskal, skema PPN final akan jauh lebih bermanfaat,” tambah Redma.

Harapan Pelaku Industri Tekstil

Di tengah kondisi sulit ini, pelaku industri tekstil hanya dapat bertahan sambil menunggu perubahan kebijakan yang lebih mendukung daya saing mereka. Menurut

Redma, langkah paling mendesak yang perlu diambil adalah pengendalian impor dan pemberantasan impor ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama keterpurukan sektor TPT.

Meski insentif seperti subsidi bunga untuk revitalisasi mesin dianggap positif, penggunaannya diperkirakan akan minim karena pelaku usaha sulit berinvestasi di tengah kondisi pasar yang tidak stabil. "Kebijakan pemerintah harus difokuskan pada langkah-langkah yang dapat mengatasi akar masalah, bukan sekadar insentif yang tidak menjawab tantangan utama," pungkas Redma.

Meskipun pemerintah telah menggulirkan berbagai insentif fiskal untuk sektor padat karya, dampaknya pada industri tekstil dinilai masih sangat terbatas. Pengendalian impor ilegal menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan sektor TPT dari keterpurukan yang berkepanjangan. Di sisi lain, kebijakan fiskal seperti penerapan PPN final juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi lebih efektif untuk meringankan beban pelaku industri.

Pelemahan Rupiah Memukul Industri Tekstil, Barang Impor China Kian Mendominasi

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus membayangi sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Penurunan ini, yang mencapai level Rp16.285/US\$ pada 19 Desember 2024, menjadi pelemahan terdalam sejak Oktober 2024. Situasi ini tidak hanya membebani biaya produksi tetapi juga memperparah persaingan dengan produk impor, khususnya dari China.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmadja,

menyebutkan bahwa pelemahan rupiah memicu lonjakan biaya produksi tekstil lokal. Sebaliknya, pelemahan yuan membuat produk tekstil China semakin kompetitif di pasar domestik. "Produk China makin murah karena yuan melemah, sehingga daya saingnya meningkat di Indonesia," ungkap Jemmy.

Hal ini diperparah dengan strategi dumping yang dilakukan China, seperti diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta. Ia menjelaskan bahwa banyak barang sisa dari China dijual dengan harga rendah akibat subsidi. "Barang jadi dari China tetap kompetitif meski dolar melemah karena pengaruh yuan dan pola dumping mereka," tambah Redma.

Beban Ganda Bagi Industri Tekstil Lokal

Selain persaingan dari produk impor, pelaku industri tekstil juga menghadapi kenaikan biaya produksi dalam negeri. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) semakin menekan pelaku usaha. "Di satu sisi biaya naik, di sisi lain barang China membanjiri pasar dengan harga murah," ujar Jemmy.

Untuk mengatasi tekanan ini, API dan APSyFI mendesak pemerintah menerapkan kebijakan proteksi seperti safeguard, aturan anti-dumping, dan penghalang non-tarif lainnya. "Kami membutuhkan regulasi yang melindungi pasar domestik agar industri lokal bisa bertahan," tegas Jemmy.

Tantangan Menjelang 2025

Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun yang semakin berat bagi industri tekstil. Langkah hawkish dari Federal Reserve serta potensi kebijakan proteksionis dari pemerintahan baru AS dapat memperburuk situasi. Jemmy khawatir bahwa barang China yang berlimpah akibat tekanan ekonomi

global akan semakin membanjiri pasar Indonesia.

Jika pelemahan rupiah tidak segera dimitigasi, potensi dampaknya akan semakin besar. "Kami harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat kebijakan proteksi agar industri dalam negeri tetap hidup," pungkas Jemmy.

Industri tekstil Indonesia kini berada di persimpangan. Tanpa dukungan kebijakan protektif yang memadai, daya saing industri lokal berpotensi terus tergerus, mengancam keberlangsungan sektor yang menjadi salah satu andalan ekonomi nasional ini.



Impor Ilegal Dituding Sebagai Pemicu PHK Massal di Industri Tekstil, Wamenaker Serukan Kerja Sama Semua Pihak

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, menanggapi keluhan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) yang menuding maraknya impor ilegal sebagai salah satu penyebab utama melemahnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Dampak dari kondisi ini disebut telah memicu penutupan pabrik dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap ratusan ribu pekerja.

Imbauan untuk Bijaksana dan Teliti

Immanuel menegaskan pentingnya semua pihak untuk bijaksana dalam menyikapi keluhan APSyFI dan memastikan kebenaran data yang disampaikan. Jika keluhan ini terbukti benar, maka langkah kolaboratif diperlukan untuk mengatasi masalah impor ilegal yang telah merugikan industri domestik.

"Atas keluhan APSyFI, semua pihak sebaiknya bijaksana dan mencari tahu apakah keluhan ini benar atau tidak. Kalau benar, perlu kerja sama semua pihak karena impor ilegal menyangkut kehidupan buruh," ujar Immanuel dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Dampak Serius Impor Ilegal

Sebelumnya, Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir impor ilegal telah membanjiri pasar domestik, mengakibatkan tekanan besar pada industri lokal. Bahkan hingga tahun 2024, sekitar 60 pabrik telah tutup dan menyebabkan lebih dari 250.000 pekerja terkena PHK.

Wamenaker Tidak Memiliki Wewenang Penindakan

Immanuel menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak memiliki kewenangan langsung untuk menangani impor ilegal. Tugas utama kementeriannya adalah mengurus kesejahteraan pekerja dan buruh. Namun, ia menggarisbawahi bahwa masalah ini pantas menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

"Keluhan APSyFI pantas dicermati semua pihak. Kalau salah, kita pantas mengingatkan APSyFI. Tetapi kalau benar, semua pihak perlu bekerja sama untuk mengakhiri impor ilegal yang melemahkan lapangan kerja," tambahnya.

Seruan untuk Kolaborasi dan Tindakan Tegas

Masalah impor ilegal ini tidak hanya berdampak pada pelaku industri, tetapi juga mengancam stabilitas lapangan kerja di sektor TPT. Wamenaker menyerukan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk mengatasi persoalan ini secara komprehensif.

Dengan langkah yang tepat, diharapkan industri TPT dapat kembali bangkit dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja yang bergantung pada sektor ini.

Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Industri Tekstil di Tegal

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri tekstil, termasuk di Kota Tegal. Jamal Alkatiri, pemilik PT. Asaputex Jaya, yang telah mengekspor produknya hingga ke Timur Tengah, menyampaikan bahwa kebijakan ini memberatkan pengusaha di sektor tersebut.



Menurut Jamal, kenaikan PPN ini memperbesar beban biaya produksi hingga 20-30%, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada daya listrik tinggi. "PPN 12 persen sangat memberatkan, terlebih kami sebagai pelaku industri yang menggunakan daya listrik lebih dari 6.600 VA," ujar Jamal saat ditemui di kantornya. Ia menambahkan bahwa kenaikan ini terasa bertubi-tubi,

mengingat pelaku usaha di Pantura juga harus menghadapi kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 6-7%.

Jamal tidak mempersoalkan kenaikan UMK karena dianggap sebagai kewajiban, tetapi ia menganggap kenaikan PPN sebagai langkah yang kurang tepat. Kebijakan tersebut dinilai tidak mempertimbangkan kondisi pengusaha yang sudah terbebani.

Selain itu, Jamal mengungkapkan bahwa masuknya tekstil ilegal melalui jalur selundupan menjadi ancaman serius bagi industri dalam negeri. Ia menyoroti pentingnya pengawasan dan penindakan tegas terhadap barang ilegal agar tidak memperburuk situasi bagi para pelaku industri tekstil di Pantura.

Jamal mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kenaikan PPN ini. Ia khawatir kebijakan tersebut justru akan menjadi bumerang, memaksa banyak pelaku usaha gulung tikar. "Jika aturan ini terus diberlakukan, banyak pelaku usaha yang akan kesulitan melangsungkan bisnisnya," tutup Jamal.

Kenaikan PPN 12% ini menjadi ujian berat bagi industri tekstil, terutama di wilayah Pantura. Jika tidak ada kebijakan mitigasi atau insentif dari pemerintah, sektor ini berpotensi mengalami perlambatan signifikan, mengancam keberlangsungan usaha serta lapangan kerja di daerah tersebut.



Lonjakan PHK Sepanjang 2024: Industri Tekstil dalam Kondisi Kritis

Sepanjang tahun 2024, lebih dari 80 ribu tenaga kerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkat signifikan dibandingkan 57.923 pekerja pada periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini menjadi alarm bagi berbagai sektor industri, terutama tekstil, yang menjadi salah satu sektor paling terdampak.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, mencatat bahwa 14 perusahaan tekstil telah melakukan PHK terhadap 13.061 tenaga kerja sejak tahun lalu hingga awal Desember 2024. Selain itu, sebanyak 34 pabrik tekstil dilaporkan gulung tikar meskipun data lengkap jumlah pekerja yang terdampak belum tersedia.

“Perusahaan tekstil yang statusnya kritis semakin banyak. Kami sedang berdiskusi dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan langkah mitigasi,” ujar Immanuel.

Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Heru Widianto, menyebut sebagian pekerja yang terkena PHK telah kembali terserap di pasar

kerja, namun banyak dari mereka tidak lagi bekerja di sektor yang sama.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azzam, menyoroti dampak melemahnya ekonomi global, sisa efek pandemi Covid-19, dan derasnya produk impor yang masuk ke Indonesia sebagai penyebab utama PHK massal. Data Apindo menunjukkan bahwa 108 ribu karyawan terkena PHK sepanjang 2024, terutama di sektor padat karya seperti alas kaki.

Selain PHK, Apindo juga mencatat tiga juta orang berhenti membayar BPJS Kesehatan, mencerminkan kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Penelitian Litbang Universitas Indonesia menemukan bahwa dari 17 sektor industri unggulan, hanya enam sektor yang mencatat pertumbuhan positif, sementara lainnya mengalami tekanan hebat.

Industri Tekstil: Deindustrialisasi dan Impor Ilegal

Industri tekstil, yang menjadi salah satu sektor padat karya utama, mengalami pukulan berat akibat deindustrialisasi yang berlangsung selama 10 tahun terakhir. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa 60 perusahaan tekstil di sektor hilir dan tengah tutup sejak 2022 hingga 2024.

“Sekitar 250 ribu pekerja di sektor tekstil telah kehilangan pekerjaan,” ungkap Redma. Ia menegaskan bahwa salah satu penyebab utama adalah masuknya impor ilegal tanpa pengawasan yang memadai. Impor ini merusak utilisasi industri lokal dan memberi dampak negatif pada sektor pendukung seperti listrik dan logistik.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah nyata untuk mengendalikan laju

impur dan melindungi industri tekstil domestik. Tanpa tindakan cepat, lonjakan PHK dan penutupan perusahaan dapat terus meningkat, mengancam kestabilan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Industri Tekstil Ambruk, Apindo Dukung Revisi Permendag 8/2024



Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan dukungan terhadap pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Kebijakan impor dalam peraturan tersebut dinilai berkontribusi pada menurunnya kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.

Kendala di Sektor Tekstil-Garmen Nasional

Shinta menyoroti sejumlah masalah mendasar di industri tekstil nasional, salah satunya adalah rendahnya revitalisasi mesin produksi. Mesin-mesin yang usang menyebabkan output produk yang dihasilkan kurang kompetitif baik dari segi efisiensi biaya maupun keberlanjutan lingkungan jika dibandingkan dengan produk serupa dari negara lain.

Selain itu, daya saing ekspor produk tekstil Indonesia juga terus menurun, terutama ke pasar utama seperti Uni Eropa (EU). Setelah diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas EU-Vietnam Free Trade Area (FTA), permintaan produk tekstil dari Indonesia ke

EU beralih ke Vietnam. Vietnam lebih unggul karena memiliki akses preferensi perdagangan yang lebih baik.

Sementara itu, ekspor tekstil Indonesia masih bergantung pada skema preferensi tarif GSP Plus yang diberikan secara unilateral oleh EU. Namun, skema ini terancam berakhir seiring meningkatnya status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas. Tanpa skema ini atau perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang belum rampung, industri tekstil Indonesia menghadapi risiko kehilangan pangsa pasar lebih besar di EU.

Impor Ilegal dan Persaingan Tidak Sehat

Di dalam negeri, persaingan usaha di industri tekstil dan garmen semakin tidak sehat. Shinta mengungkapkan banyaknya impor ilegal dan impor yang tidak sesuai aturan, seperti melalui jasa titipan (jastip), e-commerce, pakaian bermerek palsu, hingga pakaian bekas dari luar negeri. Produk ilegal ini bebas beredar di pasar, merugikan pangsa pasar lokal dan melemahkan kinerja industri nasional.

Sayangnya, penegakan hukum terhadap impor ilegal masih lemah. Pemerintah dinilai belum melakukan pembenahan struktural secara signifikan untuk mengatasi masalah ini. Menurut Shinta, diperlukan langkah tegas dalam penegakan hukum guna melindungi industri tekstil-garmen nasional dari dampak buruk impor ilegal.

Kurangnya Kapabilitas Anti-Dumping

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mendeteksi praktik dumping dan subsidi yang merugikan industri nasional. Minimnya kapabilitas dan instrumen penyelidikan anti-dumping serta anti-subsidi membuat aktivitas perdagangan tidak sehat tetap terjadi.

Shinta menegaskan, revisi Permendag 8/2024 bukanlah solusi ajaib untuk mengatasi masalah di sektor tekstil. Diperlukan pembenahan menyeluruh dari berbagai aspek untuk memulihkan dan meningkatkan daya saing industri tekstil nasional.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Apindo mendukung upaya pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor. Namun, Shinta menekankan pentingnya perbaikan struktural, penegakan hukum, dan peningkatan daya saing sebagai langkah strategis untuk membangkitkan kembali industri tekstil-garmen nasional.



WORLD TEXTILES JOURNAL

Proyeksi Kinerja Emiten Tekstil di 2025: Tantangan yang Masih Berat

Tahun 2024 menjadi masa sulit bagi sejumlah emiten tekstil Indonesia. Berbagai masalah seperti penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hingga kasus kepailitan terus menghantui industri ini. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi, memproyeksikan bahwa tahun 2025 masih akan menjadi periode penuh tantangan bagi emiten tekstil.

Persaingan Ketat dengan Barang Impor

Salah satu tantangan utama yang dihadapi industri tekstil adalah persaingan dengan barang impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga November 2024, impor tekstil dan produk pertekstilan (TPT) mencapai 1,96 juta ton dengan nilai sebesar USD 8,07 miliar. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 5,84 persen secara tahunan.

“Persaingan dengan produk impor menjadi salah satu tantangan berat, terutama dengan lonjakan jumlah impor tersebut,” ujar Oktavianus.

Pertumbuhan Positif, Namun Dihantui Sentimen Global

Meskipun industri TPT mencatat pertumbuhan positif sebesar 7,43 persen secara tahunan pada kuartal ketiga 2024, tekanan dari berbagai sentimen global diperkirakan akan menjadi penghambat di tahun depan. Oktavianus menyebut kebijakan tarif perdagangan Donald Trump di Amerika Serikat, yang merupakan pasar ekspor terbesar tekstil Indonesia, sebagai salah satu faktor yang dapat memperburuk kondisi industri.

“Di 2025, ada kekhawatiran atas kebijakan tarif yang dapat mempengaruhi ekspor ke Amerika Serikat. Ini menjadi salah satu risiko terbesar bagi industri TPT,” jelasnya.

Ketidakpastian Ekonomi dan Daya Beli yang Lemah

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan bank sentral yang melambat dari ekspektasi pasar turut menambah tekanan pada emiten tekstil. Di dalam negeri, daya beli masyarakat yang diproyeksikan melambat juga menjadi ancaman besar.

Kasus PKPU dan Kepailitan

Berbagai kasus hukum semakin memperburuk situasi industri tekstil. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu emiten

tekstil terbesar di Indonesia, baru-baru ini mengalami penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung atas putusan pailit di Pengadilan Niaga Semarang. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Tidak hanya Sritex, sejumlah emiten lain seperti PT Sejahtera Bintang Textile Tbk (SBAT), PT Pan Brothers Tbk, PT Century Textile Industry Tbk (CNTX), dan PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) juga menghadapi berbagai masalah hukum dan mendapatkan notasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Belum Ada Prospek Pemulihan

Melihat berbagai tekanan tersebut, Oktavianus menyatakan bahwa prospek pemulihan emiten tekstil masih belum terlihat. "Saat ini, kami belum merekomendasikan investasi pada emiten tekstil di tengah berbagai sentimen negatif yang ada," katanya.

Tahun 2025 diproyeksikan menjadi tahun penuh tantangan bagi industri tekstil di Indonesia. Tekanan dari persaingan barang impor, ketidakpastian global, daya beli yang melemah, hingga berbagai kasus hukum membuat prospek industri ini masih suram. Dukungan dari pemerintah untuk mengatasi banjir barang impor dan mengawasi platform e-commerce menjadi hal yang sangat dibutuhkan guna menyelamatkan sektor ini dari keterpurukan lebih lanjut.



Intertextile Shenzhen 2024



Industri Tekstil Nasional: Harapan Baru di Momentum Lebaran

Setiap menjelang Lebaran, industri tekstil nasional menghadapi tantangan besar akibat membanjirnya produk impor yang menguasai pasar domestik. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha dalam negeri gigit jari, tidak mampu memanfaatkan momentum peningkatan permintaan.



Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, menyoroti persoalan ini sebagai salah satu penyebab tertekannya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. “Setiap menjelang Lebaran, ribuan kontainer berisi kain dan produk garmen impor masuk ke pasar domestik,” ujar Redma dalam pernyataannya, Senin, 25 Maret 2019.

Dominasi Produk Impor

Dalam lima tahun terakhir, industri TPT dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor, terutama pada momen Lebaran. Situasi ini semakin parah sejak pemerintah membebaskan seluruh impor TPT melalui Pusat Logistik Berikat (PLB). Redma mengingatkan bahwa momentum terakhir ketika industri lokal menikmati peningkatan permintaan terjadi pada pertengahan 2017. Saat itu, pemerintah berhasil menertibkan impor borongan. Namun, kondisi ini hanya bertahan selama enam bulan.

Dominasi produk impor tidak hanya berdampak pada penurunan penjualan produk lokal tetapi juga mengancam kemampuan pengusaha untuk memenuhi kewajiban kepada pekerja, termasuk pembayaran tunjangan hari raya (THR). “Kalau tidak bisa jualan, pengusaha dapat uang dari mana untuk bayar THR?” tegas Redma.

Langkah Tegas Pemerintah

APSyFI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengendalikan impor. Redma menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan industri lokal yang selama ini terabaikan. Menurutnya, pengendalian impor adalah kunci untuk membalikkan tren defisit neraca perdagangan yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Presiden Joko Widodo juga diharapkan untuk turun tangan langsung mengatasi masalah ini. Redma percaya bahwa Presiden sudah mengetahui akar masalah defisit perdagangan, dan tindak lanjutnya dapat memberikan peluang bagi produk lokal untuk menguasai pasar domestik, khususnya saat Lebaran.

Potret Neraca Perdagangan Tekstil

Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan ekspor industri tekstil pada 2018 bernilai USD 4,651 miliar, turun tipis 0,1 persen dibandingkan 2017. Sebaliknya, impor produk tekstil pada 2018 meningkat 12,17 persen year-on-year menjadi USD 7,81 miliar, yang menyebabkan defisit neraca perdagangan tekstil.

Dengan adanya momentum Lebaran, pelaku industri berharap pemerintah dapat memastikan produk lokal lebih kompetitif di pasar domestik. Langkah ini tidak hanya akan membantu pemulihan industri TPT tetapi juga menjaga kesejahteraan tenaga kerja di sektor ini.

Industri tekstil nasional kini menanti keputusan pemerintah untuk memperkuat daya saing lokal di tengah derasnya arus impor. Momentum Lebaran diharapkan tidak lagi menjadi milik produk impor, tetapi menjadi momen kebangkitan produk dalam negeri.

Prabowo Ancam Tenggelamkan Kapal Penyelundup Tekstil, Buruh Desak Tindakan Tegas Terhadap Pemain Besar



Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang mengancam menenggelamkan kapal penyelundup tekstil. Namun, KSPN juga

mendesak pemerintah untuk tidak hanya menghukum alat penyelundupan, tetapi juga menindak para importir besar yang berada di balik praktik ilegal tersebut.

Presiden KSPN, Ristadi, menekankan bahwa penanganan penyelundupan harus mencakup pemberian sanksi pidana kepada para pelaku utama. "Kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo, tetapi kebijakan ini harus menasar para pemain besar, bukan hanya alat penyelundupnya," ujar Ristadi pada Selasa (31/12/2024).

Dalam empat tahun terakhir, KSPN terus menyerukan perhatian serius terhadap industri tekstil domestik, yang menjadi salah satu sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Indonesia. Buruh berharap pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang mampu mencegah penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ristadi menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya PHK di sektor tekstil adalah dominasi barang impor, termasuk barang ilegal, di pasar domestik. Barang-barang ini tidak hanya mendominasi pasar konvensional tetapi juga marketplace, dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. "Ratusan ribu pekerja sektor tekstil, garmen, dan sepatu sudah kehilangan pekerjaan, dan jutaan lainnya berada di ambang PHK," jelasnya.

Seruan Kebijakan Komprehensif

KSPN meminta pemerintah untuk segera merancang aturan yang melindungi produk tekstil lokal dari serbuan barang impor. Ristadi menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus bersifat komprehensif, bukan hanya tindakan teknis seperti menenggelamkan kapal penyelundup. "Diperlukan pendekatan yang strategis untuk melindungi pasar domestik," imbuhnya.

Selain itu, KSPN menyoroti pentingnya kehadiran pejabat dengan integritas dan keberanian dalam mengeksekusi keputusan presiden terkait pemberantasan impor ilegal. Buruh juga mengkritik adanya oknum di Ditjen Bea dan Cukai serta petugas pelabuhan yang diduga mempermudah masuknya barang impor ilegal.

“Kondisi 2025 menunjukkan bahwa meski sebagian pekerja menikmati kenaikan upah minimum, ribuan lainnya sudah terjadwal untuk PHK akibat turunnya pesanan,” ujar Ristadi.

Komitmen Presiden Prabowo

Dalam forum Musrenbangnas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ancamannya untuk menenggelamkan kapal penyelundup sebagai bagian dari upaya menghentikan kebocoran anggaran dan melindungi kedaulatan negara. Ia menyebut bahwa penyelundupan tekstil tidak hanya mengancam industri lokal tetapi juga kehidupan ratusan ribu pekerja yang bergantung pada sektor tersebut.

“Kita harus memastikan aparat pemerintah dapat menghentikan penyelundupan yang membahayakan kedaulatan dan perekonomian Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.

Langkah tegas ini diharapkan menjadi awal dari reformasi menyeluruh dalam melindungi industri tekstil nasional, yang selama ini menjadi salah satu pilar ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia.